

	News Title : Pemerintah Lengkapi Ekosistem Aset Kripto	
	Media Name : Kompas	Journalist : agp, mkn
	Publish Date : 29 July 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1&15	News Value : 387,000,000
	Resources : Subani (Direktur Utama PT Bursa Komoditi Nusantara), Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan), Nailul Huda (Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef)), Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Robby (Sekretaris Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo))	Ads Value : 129,000,000
	Section/Rubrication : Berita	Topic : Bursa Kripto

Pemerintah Lengkapi Ekosistem Aset Kripto

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan meresmikan berdirinya bursa berjangka aset kripto di Indonesia, Jumat (28/7/2023). Selain menjadi wujud keseriusan menata ekosistem aset kripto, keberadaannya juga diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus meningkatkan perlindungan kepada investor dan masyarakat pengguna.

Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menunjuk tiga lembaga yang akan mengelola bursa berjangka aset kripto, yaitu PT Bursa Komoditi Nusantara selaku penyelenggara bursa, PT Tennet Depository Indonesia selaku pengelola tempat penyimpanan, dan PT Kliring Berjangka Indonesia selaku lembaga penjaminan dan penyelesaian perdagangan pasar fisik aset kripto.

Ketiganya diharapkan me-

lengkapi ekosistem aset kripto guna mewujudkan perdagangan yang wajar dan adil sekaligus menjamin kepastian hukum dan melindungi masyarakat pengguna.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meresmikan bursa berjangka aset kripto di Jakarta menyatakan, dengan ekosistem yang lengkap, masyarakat diharapkan merasa aman dalam berinvestasi dan industri ini dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Sejauh ini ada 30 calon pedagang aset kripto yang akan menjadi anggota bursa.

”Tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi dan pemahaman dengan benar mengenai investasi yang legal. Jika tidak demikian, akan ada pelaku ilegal yang merugikan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat akan menurun dan mereka justru berinvestasi di nega-

ra lain,” tutur Zulkifli.

Peneliti ekonomi digital dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, berpendapat, meski sebelumnya sudah dibuat regulasi, ada beberapa celah yang mengakibatkan kerugian bagi investor. Keberadaan bursa aset kripto bukan sekadar memberikan literasi, melainkan juga turut memberikan jaminan kepada masyarakat. Apalagi, aset kripto merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat memberikan keuntungan besar sekaligus berisiko tinggi (*high risk high return*).

Selain itu, ada beberapa aset kripto yang bermasalah sehingga turut menambah risiko. Oleh karena itu, lanjut Nailul, bursa aset kripto ini memiliki peran kunci dalam melindungi investor dari risiko penipuan.

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-7)

(Sambungan dari halaman 1)

Direktur Utama PT Bursa Komoditi Nusantara Subani mengatakan, regulasi menjadi kunci menciptakan ekosistem yang aman, adil, dan berkelanjutan, baik bagi pelaku industri maupun pengguna aset kripto. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keberlangsungan bursa, pihaknya akan menjalankan amanat Bappebti.

"Proses pengaturan regulasi kripto ini tak mudah karena inovasi dan dinamikanya yang cepat sehingga dibutuhkan pemahaman komprehensif akan kripto. Komitmen keterbukaan, tata kelola, transparansi, serta akuntabilitas dalam menjalankan tugas sebagai bursa butuh dukungan dari pemangku kepentingan," ujarnya.

Belum beroperasi

Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan Didid Noor-diatmoko menjelaskan, kendati telah diresmikan, bursa baru dapat beroperasi ketika para pelaku industri sudah mendaftarkan diri dan pungutan biaya

operasional telah disepakati bersama. "Kami sudah membuat tata tertib yang mengatur penyelenggaraan bursa. Ada waktu satu bulan bagi para pedagang untuk masuk ke bursa melalui mekanisme pendaftaran yang ada. Lalu, mereka akan membahas biaya operasional yang dibebankan secara bisnis ke bisnis dengan pihak bursa," paparnya.

Mekanisme dimulainya bursa, lanjut Didid, telah diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bappebti No 1/2019 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri. Peraturan ini menyebut, pelaku industri diberi waktu paling lambat satu bulan sejak penetapan bursa per 17 Juli 2023.

Didid menambahkan, transaksi yang berlangsung di dalam bursa nantinya baru sebatas fisik atau jual-beli aset kripto (*spot trading*). Namun, tak menutup kemungkinan jika di masa mendatang bursa berinovasi

mengembangkan model transaksi derivatif dan *staking*.

"Harapannya, para pedagang yang jumlahnya 30 itu segera mendaftarkan diri ke bursa. Setelah mereka mendaftar, kami akan tetap mengawasi dan mulai memperkenalkan mereka ke masyarakat," kata Didid.

Hingga 24 bulan ke depan, bursa berjangka aset kripto masih akan diawasi Bappebti. Kelak, sesuai amanat Pasal 312 Undang-Undang No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), pengawasan dan pengaturan aset keuangan digital termasuk aset kripto di bawah wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hingga Juni 2023, ada 17,54 juta pelanggan aset kripto yang terdaftar. Sementara nilai transaksi selama Januari-Juni 2023 mencapai Rp 66,44 triliun.

Sekretaris Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspak-rindo) Robby menyatakan, salah satu tantangan sebelum bursa beroperasi adalah kesepakatan mengenai biaya yang akan dibebankan oleh lembaga

penyelenggara bursa. Meski akan memberi beban terhadap pelaku industri, biaya tersebut akan menjamin para investor.

"Biaya ini timbul karena demi keamanan dan kenyamanan sehingga dana masyarakat tidak disimpan oleh pedagang, tetapi oleh lembaga. Memang akan jadi beban sehingga kami akan bernegosiasi agar bursa bisa kompetitif," ujarnya.

Sebagai bagian dalam ekosistem, lanjut Robby, edukasi terkait literasi aset kripto juga menjadi fokus dari asosiasi. Apalagi, investor aset kripto cenderung didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z.

Sebelumnya, CEO Tokocrypto, salah satu platform perdagangan aset kripto, Yudhono Rawis menyatakan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah menetapkan bursa, clearing, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Langkah itu penting guna memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat perdagangan dan inovasi aset kripto serta ekosistem digital di Asia Tenggara. (AGP/MKN)